



EDITORIAL: Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional

Kepentingan nasional—atau dalam ungkapan Prancis yaitu *raison d'État*—adalah tujuan dan ambisi negara, baik ekonomi, militer, atau budaya. Menurut aliran arus utama dalam Studi Hubungan Internasional, konsep ini penting sebagai dasar bagi negara dalam melakukan hubungan internasional. Argumentasi Machiaveli mengenai kepentingan nasional banyak dirujuk dalam praktik maupun pengembangan teoretis, sebagai pembenaran bagi perilaku internasional negara yang mengabaikan kepentingan utama pada masa purba sebelumnya, yaitu agama dan moralitas. Negara diturunkan dari tatanan ilahi dan tunduk pada kebutuhan khususnya sendiri, yaitu kepentingan nasional. Kepentingan nasional sangat erat kaitannya dengan *power* negara sebagai tujuan maupun instrumen, khususnya yang bersifat destruktif (*hard power*). Ketika kepentingan nasional bertujuan untuk mengejar *power* dan *power* dipergunakan sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasional, maka konsekuensinya dalam sistem internasional yang dipersepsikan anarki—kecuali kekuasaannya sendiri—adalah kompetisi, kemunculan perimbangan kekuasaan, konflik dan perang

Praktik sejarah yang mengutamakan kepentingan nasional beserta konsekuensinya, dapat ditelusuri melalui kisah hubungan internasional yang bersifat kompetitif dan konflikual selama berabad-abad, khususnya di Eropa. Seperti, Perang Tiga Puluh Tahun, perang-perang perimbangan kepentingan nasional, Perang-perang Dunia, Perang Dingin, sampai praktik kolonisasi berbasis merkantilisme (kepentingan

ekonomi) ke pelosok-pelosok dunia merupakan wujud kisah pengejaran kepentingan nasional yang agresif.

Sejak berakhirnya era kolonisasi (1960-an) dan Perang Dingin (1989), era baru telah memunculkan kekuasaan aktor nonnegara, yaitu manusia secara individu maupun kolektif (komunitas atau institusi swasta) sebagai pemberi legitimasi kebijakan negara. Kepentingan nasional negara yang bersifat egois dan agresif tergantikan dengan kepentingan yang bersifat individualis sekaligus altruistik dan persuasif yang non-destruktif (*soft power*). Konsekuensinya adalah keberadaan diplomasi *soft power* yang memunculkan ragam diplomasi yang memberdayakan publik individu ke dalam ragam bentuk persuasi yang menarik secara populer pada tingkat nonnegara dan subnegara. Namun sejak awal tahun 2000-an (peristiwa 9/11), wacana kepentingan nasional realisme mulai kembali kepermukaan secara perlahan meskipun harus jalan seiringan dengan *soft power*.

Representasi gambaran dan pembahasan mengenai fenomena kepentingan nasional masa kini akan disajikan dalam jurnal “Intermestic Journal of International Studies” pada Volume 2 Nomor 2 bulan Mei tahun 2018 ini.

Artikel pertama berjudul *Logika Dilema Keamanan Asia Timur dan Rasionalitas Pengembangan Senjata Nuklir Korea Utara* oleh M. Najeri Al Syahrin. Artikel ini didasarkan pada pendekatan realisme dalam menjelaskan perilaku negara dengan rasionalitasnya berdasarkan kepentingan nasional. Rasionalitas yang mendasari pengembangan senjata nuklir Korea Utara terhadap dilema keamanan yang terjadi di Asia Timur dipaparkan dalam artikel ini. Diawali dengan persepsi ancaman mengenai ketidakpastian dalam hubungan keamanan antara Korea Utara dan Amerika Serikat, artikel ini mengelaborasi reaksi berantai dari siklus dilema keamanan yang menciptakan dinamika perlombaan senjata dan mengancam stabilitas keamanan kawasan Asia Timur. Dilema keamanan yang dipersepsikan oleh Korea Utara ditandai dengan polaritas kekuatan, faktor historis dan konstruksi sosial *amity* dan *enmity*. Hal ini, berdasarkan rasionalitas realisme, membuat Korea Utara mengambil tindakan berupa pengembangan senjata nuklir untuk menjamin keamanan yang merupakan kepentingannya, dari kemungkinan serangan dari Amerika Serikat dan negara aliansinya di Asia Timur, yaitu Jepang dan Korea Selatan. Program pengembangan senjata nuklir Korea Utara ini dinilai sangat mengancam stabilitas keamanan kawasan, tidak hanya oleh negara-negara

sekawasan tetapi juga oleh Amerika Serikat dan negara-negara lain yang bersiap siaga dalam menjawab ancaman yang datang. Eskalasi ketegangan keamanan di Semenanjung Korea kian berkembang menjadi lebih kompleks dan dilematis daripada sebelumnya. Pada bagian akhir artikelnya, M. Najeri Al Syahrin berpandangan bahwa semakin kuat pertahanan dan sistem persenjataan negara-negara Asia Timur, maka Korea Utara akan merasa semakin terancam sehingga berupaya mengembangkan kebijakan nuklir untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan serta mengimbangi keunggulan militer negara-negara lain di Asia Timur.

Kepentingan nasional dalam hubungan internasional yang berbentuk suatu program, dibahas oleh Iqbal Ramadhan dalam artikel berjudul *China's Belt Road Initiative: Dalam Pandangan Teori Geopolitik Klasik*. Dalam artikel ini Teori McKinder (*Heartland Theory*) dan Teori Mahan dianggap masih cukup relevan untuk membahas program yang diinisiasi pemerintah Cina, yaitu *China's Belt Road Initiative* (BRI). Program tersebut berkenaan dengan kepentingan Cina dalam pembangunan dua jalur perdagangan melalui wilayah daratan dan laut. Kedua jalur perdagangan internasional ini akan melibatkan kerja sama dengan negara-negara lain yang dilewati, yakni sekitar 65 negara di wilayah Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa). Oleh karena itu, Presiden Xi Jinping dalam banyak kesempatan berusaha meyakinkan negara-negara tersebut tentang manfaat bersama dari kedua jalur perdagangan yang akan dibangun tersebut. Untuk merealisasikan proyek BRI ini, pemerintah Cina mengeluarkan sejumlah besar dana yang akan diinvestasikan dalam bentuk bantuan luar negeri kepada negara-negara strategis di Asia, seperti: Indonesia, Pakistan, India dan beberapa negara di Asia Tengah, yang memerlukannya bagi pembangunan koridor bagi keperluan dua jalur di wilayahnya.

Berdasarkan kedua teori yang digunakan oleh Ramadhan, secara geopolitik dan geoekonomi, BRI berpotensi memberikan keuntungan bagi kepentingan ekonomi dan politik nasional sekaligus posisi strategis Cina, khususnya di Asia. Keuntungan tersebut dianggap menjadi ancaman bagi hegemoni Amerika Serikat di seluruh belahan dunia. Proyek BRI sebagai salah satu tanda memberikan jalan bagi kebangkitan Cina menuju *superpower* baru.

Keluarnya Inggris dari Uni Eropa, yang dikenal dengan istilah *British Exit* (Brexit), pada tahun 2016 merupakan representasi dari semakin menguatnya wacana kepentingan nasional sebagai pertimbangan dan pembenaran utama bagi tindakan sepihak

suatu negara di dalam arena internasional. Dalam kasus ini, khususnya membahas mengenai keluarnya keanggotaan sebuah negara dari institusi integrasi pluralistik negara-negara sekawasan. Fenomena ini dibahas oleh Hardi Alunaza SD dan Virginia Sherin dalam artikel *Pengaruh British Exit (Brexit) Terhadap Kebijakan Pemerintah Inggris Terkait Masalah Imigran*. Lebih dalam lagi, artikel ini membahas mengenai kepentingan nasional berdimensi internasional dan domestik (intermestik) pasca Brexit terkait masalah imigran yang berdatangan dan menetap di Inggris.

Salah satu penyebab terjadinya Brexit adalah masalah imigran, termasuk pengungsi, yang masuk ke Eropa. Berdasarkan peraturan Uni Eropa, permasalahan yang menimpa salah satu negara anggota Uni Eropa akan ditanggulangi oleh negara-negara anggota lainnya, termasuk Inggris. Salah satu permasalahan adalah masalah imigran. Inggris yang sejak awal keberatan akhirnya memutuskan untuk menanggulangi sendiri dengan caranya sendiri meskipun harus keluar dari keanggotaannya di Uni Eropa melalui referendum di Kerajaan Inggris sebagai legitimasinya. Brexit didasarkan pada pertimbangan kepentingan nasional yang mengutamakan keamanan negara dan bangsanya sendiri, disusul kemudian dengan implementasinya di dalam negeri dengan mengeluarkan kebijakan pemerintah pemerintah terkait imigran. Salah satu wacana terkait kebijakan baru Inggris mengenai imigran ini adalah mengenai pembatasan jumlah dan seleksi imigran. Sudah tentu kebijakan ini akan berdampak bagi imigran maupun bagi masyarakat Inggris itu sendiri.

Dua artikel terakhir adalah mengenai diplomasi sebagai sarana kepentingan nasional tanpa penggunaan kekerasan, yaitu diplomasi negara Indonesia. Indonesia pada masa pemerintahan Joko Wododo telah menunjukkan beberapa pelaksanaan diplomasi yang cukup signifikan baik secara bilateral maupun multilateral dan menjadi catatan dan perhatian internasional. Selain diplomasi kemanusiaan yang dilancarkan Pemerintah Indonesia secara bilateral dalam kasus Rohingya dengan para penguasa di Myanmar, diplomasi lainnya adalah diplomasi Maritim yang dilaksanakan secara multilateral pada masa kepemimpinan Indonesia pada IORA atau Asosiasi Kerja Sama Lingkar Samudera Hindia 2015-2017.

Ludiro Madu menulis artikel berjudul "Urgensi *Indian Ocean Rim Association* (IORA) dalam Diplomasi Maritim Indonesia", membahas mengenai keterlihatan kepercayaan diri pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam melakukan diplomasi

multilateral terkait dengan masalah maritim pada forum IORA. IORA tampil menjadi ruang diplomasi baru bagi pemerintahan Jokowi, yaitu dari ASEAN-sentris menuju Indo-Pasifik. Di forum ini Indonesia menemukan arena yang relevan bagi mewujudkan kepentingan nasionalnya, tidak hanya dari sisi peningkatan kekuatan maritim yang dimiliki, namun juga untuk mengimplementasikan Visi dan doktrin maritim pemerintahan Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim global (*global maritime fulcrum*). Salah satu wujud visi tersebut adalah terciptanya stabilitas, perdamaian dan keamanan di kawasan Samudra India. Stabilitas tersebut diperlukan untuk menjamin kerja sama ekonomi menuju kesejahteraan negara-negara kawasan tersebut. Oleh karena itu, stabilitas, perdamaian, dan keamanan kawasan menjadi kata kunci dalam diplomasi maritim Indonesia di IORA.

Kecenderungan keamanan dan potensi ekonomi itu telah memperlihatkan urgensi maritim dari IORA bagi negara-negara di sepanjang Samudra Hindia, khususnya Indonesia. Melalui IORA, Indonesia dapat melancarkan diplomasi maritim yang modern dan inovatif dalam mengakomodasi cakupan isu yang lebih luas dan aktor yang lebih beragam untuk membangun strategi yang kreatif dalam menghadapi kompleksitas hubungan antarnegara. Indonesia dapat mendorong lebih banyak kerja sama maritim, baik antarnegara, negara dan masyarakat, serta masyarakat dan masyarakat. Pada forum IORA pula, Indonesia dapat mendorong sejumlah terobosan penting guna memperkuat kemitraan di kawasan untuk memelihara perdamaian dan stabilitas kawasan, sebagai prasyarat utama bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan menuju kawasan Samudra Hindia sebagai pusat pertumbuhan yang baru. Forum IORA merupakan momentum bersejarah yang menjadikan IORA sebagai bagian dari diplomasi maritim Indonesia. Forum ini menjadi ujian bagi diplomasi Indonesia untuk mewujudkan poros maritim global di sepanjang Samudra Hindia.

Kepentingan nasional lainnya yang diupayakan melalui jalur persuasi adalah dengan menggunakan diplomasi publik (DP), khususnya secara lebih spesifik, diplomasi pariwisata. Pada masa ini, terdapat kecenderungan baru dalam dunia pariwisata, yakni pariwisata yang mengedepankan wisata bernuansa religius dengan tema wisata halal (*Halal tourism*). Pemerintah Indonesia melalui pemerintah daerahnya juga tengah menggiatkan dan mengembangkan tren wisata halal di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Salah satu bentuknya adalah promosi ke luar negeri. Dalam Studi Hubungan

Internasional kegiatan promosi ini dipandang sebagai sebuah diplomasi, yaitu diplomasi wisata.

Fenomena diplomasi wisata halal dibahas oleh Alwafi Ridho Subarkah dalam artikel berjudul “Diplomasi Pariwisata Halal Nusa Tenggara Barat”. Wisata halal, seperti yang dijelaskan oleh Subarkah, yaitu segmen wisata dengan tujuan memberikan fasilitas kebutuhan dasar yang diperlukan oleh wisatawan muslim sesuai dengan hukum Islam. Fasilitas yang dimaksudkan, di antaranya: ketersediaan makanan dan minuman dengan label halal, restoran halal, hotel syariah, tempat beribadah beserta perlengkapannya, dan situs-situs religius bersejarah untuk dikunjungi. Beberapa negara telah mengembangkan wisata jenis ini, seperti: Australia, Inggris, Hongkong, Thailand, Malaysia, dan Korea selatan; meski populasi muslim di negara-negara tersebut tergolong sedikit.

Alwafi berangkat dengan pandangan bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim sehingga berpotensi melakukan pembangunan wisata halal. Dalam hal ini, Indonesia memilih NTB, dengan Lombok sebagai pusatnya, sebagai sasaran pembangunan destinasi utama wisata halal dengan target utama dari wisatawan asal Timur Tengah, khususnya Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Dengan mayoritas masyarakat memeluk agama Islam dan memiliki masjid yang terbanyak (NTB sebagai “Pulau Seribu Masjid”), NTB memiliki visi “*Beriman, Berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera*”. Pada perkembangannya, wisata halal NTB telah berhasil mendapatkan beberapa penghargaan internasional bergengsi pada tahun 2015 dan 2016 sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia, wisata halal *honeymoon* terbaik dunia, dan *website* wisata halal terbaik. Keberhasilan ini tidak lepas keterkaitannya dengan diplomasi publik sebagai sarana promosi wisata halal bagi tujuan pariwisata di NTB, dan wisata halal itu sendiri sebagai diplomasi publik bagi tujuan Indonesia yang lebih besar dan luas.

Dalam melancarkan diplomasi publik sebagai media promosi wisata halal, pemerintah Indonesia melakukan kerja sama dengan beberapa pihak, antara lain dengan komunitas pemuda sadar wisata; dengan Kedutaan Besar Malaysia dan Kedutaan negara-negara Timur Tengah dalam program *Familiarization Trip (Fam Trip)*; dan mengundang beberapa jurnalis asal Arab Saudi untuk menikmati wisata Lombok agar kemudian dipromosikan di negara asalnya. Selain itu diplomasi publik wisata halal NTB oleh pihak Indonesia dilancarkan melalui beberapa *event* internasional di luar maupun di dalam negeri. Keberhasilan diplomasi publik ini diperlihatkan dari jumlah kunjungan

wisatawan, penjajagan investasi ke NTB asal Timur Tengah dan peninjauan kemungkinan dibukanya jalur penerbangan langsung dari Timur Tengah ke Lombok.

Pada Volume 2 No. 2 Mei 2018 ini, kami menghaturkan ucapan terimakasih tak terhingga atas kesediaan empat penelaah sejawat atau mitra bestari (*peer reviewer*) baru, yaitu: Dr. Philips J. Vermonte dari *Center for Strategic and International Studies, Indonesia*; Dr. Dina Afrianty, dari *Institute for Religion, Politics, and Society, Australian Catholic University, Australia*; Abubakar Eby Hara, Ph.D. dari *Universitas Jember, Indonesia*; dan Badrus Sholeh, Ph.D., dari *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Indonesia*.

Demikian pula kepada seluruh kontributor dan mitra bestari yang terlibat dalam terbitan volume ini, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Hormat Kami,

Arry Bainus dan Junita Budi Rachman

Pimpinan Redaksi dan Wakil Pimpinan Redaksi